



HUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS DESA DENGAN STRUKTUR EKONOMI LOKAL: STUDI TINGKAT DESA DI MALUKU UTARA

Mohamad Yusuf¹, Anissa Amoretta Hidayah²

^{1, 2}Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ternate

Alamat Korespondensi: yusuf.lpd154@gmail.com

Abstract

This study aims to identify Village Fund activities that influence village economic development in North Maluku Province and examine the impact of village priority program policies on village economic structure in the North Maluku region. The method used is tagging and panel data regression with a fixed effect model. The results of the study show that (1) village fund activities in the economic dimension were mostly used to support regional openness, especially during the pre-Covid-19 pandemic period, whereas during the pandemic the priority of their use shifted to economic recovery programs; (2) an increase in village funds and the presence of BUMDes reduces the composition of the tertiary sector workforce and increases the composition of the primary and secondary sector workforce. These findings indicate that village funds and BUMDes have an impact on changes in the village economic structure in the North Maluku region.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan dana desa yang memengaruhi pembangunan ekonomi desa di Provinsi Maluku Utara dan menguji dampak kebijakan program prioritas desa terhadap struktur ekonomi desa di wilayah Maluku Utara. Metode yang digunakan adalah *tagging* dan regresi data panel dengan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kegiatan dana desa pada dimensi ekonomi sebagian besar digunakan untuk mendukung keterbukaan wilayah, terutama pada masa sebelum pandemi Covid-19, sedangkan pada masa pandemi prioritas penggunaannya bergeser untuk program pemulihan ekonomi; (2) kenaikan dana desa dan keberadaan BUMDes menurunkan komposisi tenaga kerja sektor tersier serta menaikkan komposisi tenaga kerja sektor primer dan sekunder. Temuan yang dihasilkan menunjukkan bahwa dana desa dan BUMDes berdampak pada perubahan struktur ekonomi desa di wilayah Maluku Utara.

Keywords: BUMDes, Dana Desa, Maluku Utara, Struktur Ekonomi, Tenaga Kerja

JEL Classification: H53, H72, J21



PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan masih menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia. Luasnya wilayah kepulauan dengan kondisi geografi dan tipikal masyarakat yang beragam menjadi tantangan dalam melaksanakan pembangunan yang merata di negara ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat menikmati pemerataan pembangunan adalah dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa, atau membangun Indonesia dari pinggiran.

Dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan di daerah, pemerintah membuat terobosan dengan melaksanakan desentralisasi fiskal pada tingkat pemerintahan paling rendah, yaitu pada level desa melalui program dana desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menunjukkan semangat pemerintah untuk melakukan desentralisasi sampai pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga lebih responsif dalam menyediakan *public goods* sesuai dengan preferensi lokal, misalnya untuk membangun jalan, jembatan, embung, pasar, dan lainnya. Selain itu, desa juga dapat membangun badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menunjang kegiatan perekonomian desa, sehingga terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan tersedia alternatif lapangan pekerjaan lain.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola program dana desa secara mandiri. Pengelolaan program tersebut dilaksanakan

berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat, baik dalam rencana penggunaannya maupun eksekusi belanjanya. Pemberian kewenangan yang telah dijalankan pemerintah desa perlu diidentifikasi, apakah dana desa telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam mendukung pembangunan ekonomi di desa? Inilah yang menjadi pertanyaan pertama dari penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kegiatan-kegiatan pada program dana desa yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa diidentifikasi melalui pemetaan (*mapping*) dan penandaan (*tagging*) belanja dana desa. Identifikasi ini dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa pemanfaatan dana desa telah sesuai dengan yang dimandatkan oleh pemerintah pusat, dan hasil dari *tagging* tersebut akan memberikan jawaban apa saja program prioritas desa pada tiap daerah dan komposisi *share* belanja ekonominya.

Penggunaan dana desa selain diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan mempunyai efek *multiplier* sehingga bisa memberikan *output* yang berkelanjutan. Salah satu manfaat dari penggunaan dana desa yaitu terdapat peningkatan peluang usaha di desa dengan bertambahnya jenis pekerjaan yang semakin bervariasi. Bertambahnya peluang usaha di desa dapat menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran struktur tenaga kerja, yang menandakan adanya perubahan struktur ekonomi di daerah tersebut. Terjadinya perubahan struktur tenaga kerja tersebut kemudian memunculkan pertanyaan kedua dalam penelitian ini,

yaitu apakah kebijakan program prioritas desa berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi desa?

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka terdapat dua tujuan dalam studi ini, yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dana desa yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa di Provinsi Maluku Utara, dan menguji dampak kebijakan program prioritas desa terhadap struktur ekonomi desa di wilayah Maluku Utara. Kedua tujuan tersebut yang kemudian memunculkan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu bahwa program prioritas desa akan memengaruhi struktur ekonomi desa di wilayah Maluku Utara.

Tujuan pertama penelitian ini dicapai dengan menganalisis program dana desa melalui pemetaan setiap kegiatan dana desa terkait dimensi ekonomi dalam indeks desa membangun (IDM) dan juga menghitung realisasinya dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Sedangkan untuk tujuan kedua dicapai dengan melakukan regresi data panel guna menguji dampak kebijakan program prioritas desa terhadap struktur tenaga kerja di desa. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data panel dengan unit observasi seluruh desa di Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, dengan mempertimbangkan ketersediaan data dari instansi terkait. Penelitian ini akan memberikan kebaruan karena belum ada penelitian yang secara spesifik yang melihat hubungan dana desa dengan

perubahan struktur ekonomi di tingkat desa di wilayah Maluku Utara.

TINJAUAN LITERATUR

De Mello (2000) mendefinisikan konsep desentralisasi fiskal sebagai pendelegasian sumber pendapatan dan fungsi pengeluaran ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Sistem desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan sendiri anggarannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam menentukan barang publik (Rosen & Gayer, 2010).

Hindriks & Myles (2006) melihat bahwa salah satu keuntungan penting dari sistem desentralisasi adalah menyesuaikan penyediaan barang dan jasa publik dengan preferensi lokal. Idanya adalah bahwa pemerintah daerah lebih dekat dan lebih responsif terhadap preferensi masyarakat dibandingkan pemerintah pusat.

Kusuma (2016) memandang bahwa perpindahan kewenangan pengelolaan dana dari pusat ke daerah melalui skema dana transfer pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Para pembuat kebijakan percaya bahwa desentralisasi akan membantu dalam memberikan layanan secara efisien di tingkat lokal, sehingga meningkatkan kondisi kehidupan dan mendiversifikasi peluang ekonomi di daerah perdesaan (Tiwari, 2017).

Kebijakan dana desa adalah salah satu wujud dari desentralisasi fiskal di Indonesia. Program dana desa bertujuan

untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan, serta mengentaskan kemiskinan (Kemenkeu, 2019). Rachma et al. (2019) menambahkan bahwa pemberian dana desa dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi roda perekonomian di tingkat desa.

Berbagai studi menyebutkan bahwa program dana desa di Indonesia telah memberikan bermacam manfaat, antara lain: (1) Mengurangi kemiskinan (Saragi et al., 2021; Sigit & Kosasih, 2020; Kadafi et al., 2020; Rachma et al., 2019; Yazid et al., 2019); (2) Meningkatkan jumlah infrastruktur (Dwitayanti et al., 2020; Aziz, 2016); (3) Meningkatkan ekonomi dan partisipasi masyarakat (Murliasari, 2021); (4) Meningkatkan status kemandirian desa atau indeks desa membangun (Arina et al., 2021); (5) Mengurangi prevalensi stunting (Indra & Khoirunurrofik, 2022); (6) Meningkatkan jumlah badan usaha milik desa (Arifin et al., 2020).

Dana desa yang diterima oleh desa-desa di Indonesia dapat digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, salah satunya untuk mendirikan dan mendukung operasi ekonomi BUMDes. BUMDes dibangun untuk mengelola potensi desa, menciptakan pasar dan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian desa dan pelayanan publik, serta meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat desa. BUMDes memiliki potensi untuk mendukung penduduk desa agar terlibat dalam kegiatan pertanian maupun non-pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan

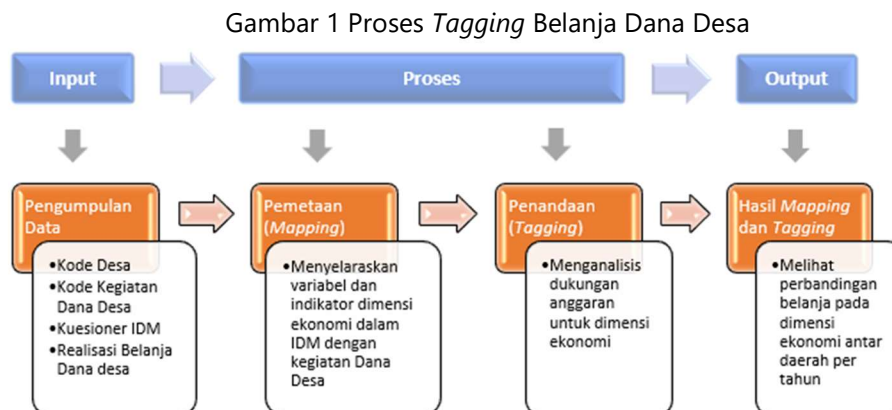
mereka. Misalnya, kemudahan akses pinjaman tanpa agunan dapat membantu mereka membeli benih pertanian atau melakukan kegiatan non-pertanian seperti perdagangan (Arifin et al., 2020).

Dana desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi desa dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Dalam menggambarkan hasil pembangunan desa, dapat digunakan IDM yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks ini disusun untuk menetapkan status kemandirian dan kemajuan desa serta menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pembangunan desa. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ekologi/lingkungan, dan indeks ketahanan sosial. Indeks tersebut disusun berlandaskan konsep bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling melengkapi. Setiap dimensi tersebut dibentuk dari sejumlah variabel yang dirinci dalam indikator-indikator.

METODE PENELITIAN

Penandaan (*Tagging*) Belanja Dana Desa

Tujuan pertama dari penelitian ini akan dipenuhi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengadopsi kerangka penelitian Yusuf & Khoirunurrofik (2022) dalam melakukan proses *tagging*. Rangkaian tahapan dalam melakukan *tagging* dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Yusuf dan Khoirunurrofik (2022)

Tahap pertama dalam rangkaian proses *tagging* adalah mengumpulkan data-data untuk dianalisis. Data yang dikumpulkan yaitu kode desa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 146. 1-4717 Tahun 2020, kode kegiatan dana desa berdasarkan klasifikasi belanja yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, formulir kuesioner IDM yang digunakan oleh Kemendesa PDTT untuk menghimpun data dan informasi desa, serta realisasi belanja dana desa yang terdiri dari data penyaluran dan data penyerapan dana desa.

Setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya masuk ke tahap pemrosesan data, yaitu pemetaan (*mapping*). Pada tahapan pemetaan, variabel serta indikator dimensi ekonomi dalam IDM dan kegiatan dana desa diselaraskan, dengan tujuan untuk menganalisis apakah dana desa telah digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung dan selaras dengan pembangunan desa, khususnya pada

dimensi ekonomi. Hubungan antara indikator IDM dengan kegiatan dana desa dapat dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menjadikan indikator IDM sebagai acuannya. *Content analysis* pada studi ini dilakukan dengan memahami dan mencocokkan makna kata-kata dalam deskripsi kegiatan dana desa dengan indikator yang masuk pada dimensi ekonomi dalam IDM. Dengan cara ini dapat diperoleh gambaran bagaimana keterkaitan kegiatan dana desa dengan pembangunan desa pada dimensi ekonomi.

Tahap selanjutnya adalah melakukan penandaan (*tagging*) dengan menganalisis dukungan anggaran untuk pembangunan desa pada dimensi ekonomi. Berdasarkan hasil pemetaan pada langkah sebelumnya, selanjutnya data realisasi dana desa digunakan untuk mencari realisasi belanja pada masing-masing variabel dimensi ekonomi. Tahapan ini akan menghasilkan realisasi dana desa berdasarkan dimensi ekonomi, yang mencerminkan prioritas desa atau

daerah dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan di bidang ekonomi. Ketiga tahapan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan output berupa perbandingan belanja pada dimensi ekonomi antar daerah setiap tahunnya yang kemudian dapat dilakukan analisis secara kualitatif.

Regresi Data Panel

Metode regresi data panel yang dipakai dalam penelitian ini telah sesuai dengan data yang digunakan, yaitu gabungan dari data *time-series* (runtun waktu) dan *cross-section* (data silang). Unit observasi pada studi ini adalah seluruh desa di Provinsi Maluku Utara, sedangkan periode observasi adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Regresi data panel digunakan untuk memenuhi tujuan kedua dalam penelitian ini, yaitu untuk menguji dampak kebijakan program prioritas desa terhadap struktur ekonomi lokal. Program prioritas desa yang memberikan dampak terhadap struktur ekonomi lokal tersebut diuji dengan melihat perubahan komposisi tenaga kerja di desa yang dipengaruhi oleh realisasi penyaluran dana desa, komposisi *share* belanja dimensi ekonomi, dan keberadaan BUMDes. Secara empiris, model untuk mengestimasi pengaruh program prioritas desa terhadap struktur ekonomi adalah sebagai berikut:

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 SE_{it} + \beta_3 BD_{it} + \beta_4 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

$$PS_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 DD_{it} + \gamma_2 SE_{it} + \gamma_3 BD_{it} + \gamma_4 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

$$PT_{it} = \delta_0 + \delta_1 DD_{it} + \delta_2 SE_{it} + \delta_3 BD_{it} + \delta_4 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots (3)$$

dengan PP_{it} adalah persentase jumlah pekerja di sektor primer di desa i dan tahun t ; PS_{it} adalah persentase jumlah pekerja di sektor sekunder di desa i dan tahun t ; PT_{it} adalah persentase jumlah pekerja di sektor tersier di desa i dan tahun t ; DD_{it} adalah realisasi penyaluran Dana Desa; SE_{it} adalah komposisi *share* belanja dimensi ekonomi terhadap realisasi penyerapan Dana Desa; BD_{it} adalah variabel *dummy* yang bernilai 1 jika desa mempunyai BUMDes dan 0 jika tidak; X_{it} mewakili variabel kontrol yang mungkin mempengaruhi hasil, yaitu jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan variabel *dummy* status daerah yang bernilai 1 jika desa berada di kabupaten tertinggal dan 0 jika tidak; serta ε_{it} merupakan *error term*.

Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu *pooled least square* (PLS) atau *common effect model*, *fixed effect model* (FE), dan *random effect model* (RE). Pengujian perlu dilakukan untuk memilih model terbaik dari ketiga pendekatan tersebut. Tahapan pertama dalam memilih model terbaik dilakukan melalui pengujian Breusch Pagan Lagrange Multiplier Test atau Uji LM untuk mengetahui apakah model RE lebih baik daripada PLS, kemudian selanjutnya dapat dilakukan Hausman Test atau Uji Hausman untuk membandingkan model FE dengan RE.

Pengujian atas model regresi data panel dalam studi ini juga dilakukan dengan uji asumsi klasik melalui uji *multikolinearitas* dengan melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF), jika nilai VIF kurang dari 10 maka diindikasikan tidak terdapat *multikolinearitas*. Sedangkan uji *autokorelasi* dan uji *heteroskedastisitas* tidak dilakukan,

Tabel 1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Satuan
PP	Persentase jumlah pekerja sektor primer di tingkat desa	%
PS	Persentase jumlah pekerja sektor sekunder di tingkat desa	%
PT	Persentase jumlah pekerja sektor tersier di tingkat desa	%
JP	Jumlah penduduk di tingkat desa	Orang
BD	Status keberadaan BUMDes Bernilai 1 jika desa memiliki BUMDes, 0 jika tidak	Dummy
DD	Realisasi Dana Desa yang disalurkan	Juta Rp.
SE	Komposisi share belanja dimensi ekonomi terhadap realisasi penyerapan Dana Desa	%
LW	Luas wilayah desa	Km ²
DT	Status daerah (kabupaten) Bernilai 1 jika desa di kabupaten tertinggal, 0 jika tidak	Dummy

Sumber: Hasil Pengolahan

karena jumlah observasi pada set data panel dalam studi ini cukup banyak namun variasi waktunya sedikit, sehingga regresi data panel pada studi ini diestimasi dengan menggunakan metode *cluster standard error*. Metode ini sudah dapat mengatasi masalah *autokorelasi* dan *heteroskedastisitas*, maka tidak perlu dilakukan lagi uji *autokorelasi* dan *heteroskedastisitas* (Wooldridge, 2010).

Data dan Variabel

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder tingkat desa di Maluku Utara dengan periode observasi tahun 2019 sampai dengan 2021. Data BUMDes dan Kuesioner IDM bersumber dari Kemendesa PDTT. Data realisasi Dana Desa bersumber dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Data jumlah penduduk desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data luas wilayah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data status

daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku. Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana pada Tabel 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Tenaga Kerja dan Program Prioritas Desa

Unit observasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Provinsi Maluku Utara. Periode observasi adalah tahunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Referensi desa yang digunakan pada studi ini mengacu pada Kepmendagri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia tahun 2020.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata persentase jumlah pekerja sektor primer di desa (PP) terus mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Meskipun

Tabel 2 Deskripsi Struktur Tenaga Kerja dan Program Prioritas Desa

Variabel	Satuan	2019	2020	2021
PP	%	80.54	80.48	80.04
n	Desa	1,047	1,060	1,060
PS	%	0.83	0.91	1.35
n	Desa	1,047	1,060	1,060
PT	%	18.63	18.61	18.61
n	Desa	1,047	1,060	1,060
JP	Orang	958	970	992
n	Desa	1,063	1,063	1,063
BD	%	70.29	73.47	73.66
n	Desa	1,057	1,063	1,063
DD	Juta Rp.	838.51	856.43	864.09
n	Desa	1,063	1,063	1,063
SE	%	44.05	51.97	51.39
n	Desa	1,058	1,049	1,063
DT	%	71.21	14.02	14.02
n	Desa	1,063	1,063	1,063

Sumber: Hasil Pengolahan

jumlahnya selalu menurun, sektor primer tetap masih mendominasi jenis pekerjaan pada desa-desa di Maluku Utara, hal ini terlihat dari rata-rata persentase jumlah pekerja sektor primer yang jauh lebih besar daripada sektor sekunder dan tersier.

Sementara, rata-rata persentase jumlah pekerja sektor sekunder (PS) di desa terus mengalami peningkatan selama periode observasi, sedangkan pekerja sektor tersier (PT) cenderung menurun namun relatif stabil. Persentase jumlah pekerja sektor sekunder lebih kecil dibandingkan dengan sektor tersier, karena cakupan jenis pekerjaannya lebih sedikit dibandingkan sektor tersier. Penurunan persentase jumlah pekerja di sektor primer dan tersier serta peningkatan persentase jumlah pekerja di sektor sekunder menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur

perekonomian di desa yang terlihat dari perubahan struktur jumlah tenaga kerja.

Rata-rata jumlah penduduk desa (JP) mengalami kenaikan setiap tahun. Pertambahan jumlah penduduk bisa disebabkan oleh jumlah angka kelahiran yang lebih besar daripada angka kematian dan atau jumlah penduduk yang masuk ke desa lebih besar daripada penduduk yang keluar dari desa. Selanjutnya, rata-rata desa yang memiliki BUMDes (BD) terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah desa yang memiliki BUMDes mengindikasikan kesadaran masyarakat desa tentang peran penting BUMDes.

Rata-rata realisasi penyaluran Dana Desa (DD) terus mengalami kenaikan. Peningkatan ini mengikuti pagu anggaran Dana Desa yang juga selalu meningkat. Sementara, rata-rata komposisi *share* belanja dimensi ekonomi terhadap realisasi penyerapan Dana Desa (SE) mengalami fluktuasi,

Tabel 3 Pemetaan Kegiatan Dana Desa pada Dimensi Ekonomi

Dimensi Ekonomi	Kegiatan Dana Desa
Keragaman Produksi Masyarakat	- Bantuan perikanan - Pelatihan teknologi untuk perikanan darat / nelayan - Peningkatan produksi peternakan - Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan - Peningkatan produksi tanaman pangan - Pengembangan sarana prasarana UMKM serta koperasi - Pengembangan industri kecil level desa - Pembentukan / pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif - Pengadaan teknologi untuk pengembangan ekonomi - Pemeliharaan dan pembangunan sarpras pariwisata milik desa - Pengembangan pariwisata desa - Kegiatan sub bidang pariwisata lainnya
Akses Pusat Perdagangan dan Pasar	- Pemeliharaan pasar desa / kios milik desa - Pembangunan / rehabilitasi pasar desa / kios milik desa
Akses Perbankan dan Kredit	- Penguatan Koperasi/KUD/UMKM - Studi lapangan pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM - Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) - Penguatan permodalan BUMDes - Pelatihan pengelolaan BUMDes
Keterbukaan Wilayah	- Pemeliharaan dan pembangunan sarpras transportasi desa - Pemeliharaan dan pembangunan jalan desa - Pemeliharaan dan pembangunan jembatan milik desa - Pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan permukiman - Pemeliharaan dan pembangunan prasarana jalan desa - Pemeliharaan dan pembangunan jalan usaha tani
Bantuan Sosial	- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa - Bantuan pangan / Sembako
Penyertaan Modal	- Penyertaan Modal BUMDes

Sumber: Yusuf dan Khoirunurrofik (2022)

semula naik drastis di tahun 2020 kemudian sedikit menurun di tahun 2021. Peningkatan belanja pada dimensi ekonomi sebagian besar untuk membantu menangani dampak Covid-19 di desa, antara lain melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagai program bantuan perlindungan sosial.

Selanjutnya, jumlah desa yang berada di daerah tertinggal (DT) mengalami penurunan pada tahun 2020

dan tetap pada tahun 2021 karena mengikuti status daerah (kabupaten) tempat desa tersebut berada. Perubahan status daerah tertinggal ditetapkan setiap 5 tahun melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Hasil Penandaan (*Tagging*) Kegiatan pada Belanja Dana Desa

Tujuan pertama studi ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan-

Tabel 4 Belanja Dana Desa di Maluku Utara pada Dimensi Ekonomi

Dimensi Ekonomi	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Keragaman Produksi Masyarakat	93,558,278,432	54,346,926,467	52,949,251,454
Akses Pusat Perdagangan dan Pasar	2,227,285,554	1,101,309,812	589,840,059
Akses Perbankan dan Kredit	8,272,800,397	2,637,732,183	1,586,432,047
Keterbukaan Wilayah	265,178,828,318	149,385,919,947	142,508,956,599
Bantuan Sosial	753,778,000	236,235,011,610	202,152,639,315
Penyertaan Modal	17,755,966,119	5,161,067,017	6,108,487,379
Total	387,746,936,820	448,867,967,036	405,895,606,853

Sumber: Hasil Pengolahan

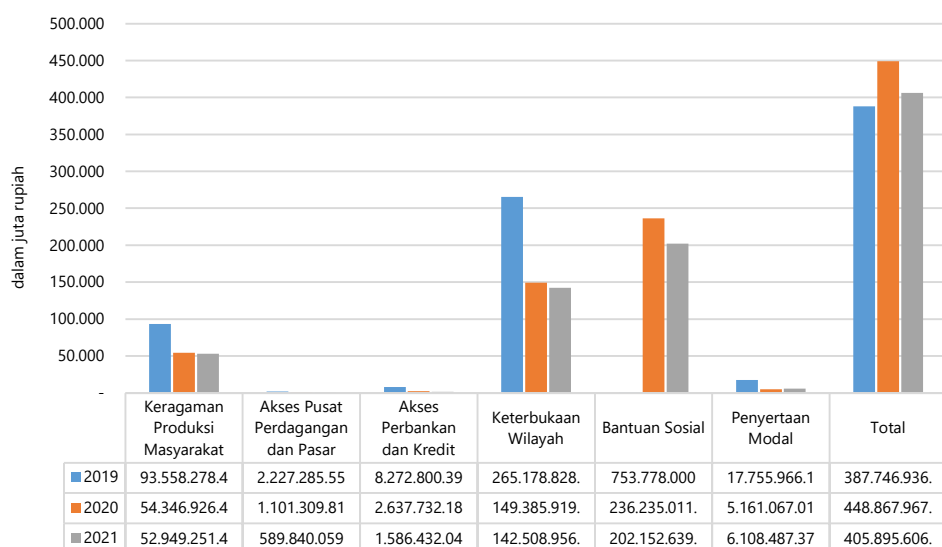
kegiatan program Dana Desa yang dapat memengaruhi pembangunan ekonomi desa di Provinsi Maluku Utara. Untuk memenuhi tujuan tersebut, dilakukan pemetaan (*mapping*) dan penandaan (*tagging*) berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

Pemetaan kegiatan Dana Desa terhadap dimensi ekonomi pada IDM mengacu pada hasil penelitian Yusuf dan Khoirunurrofik (2022) sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Dari pemetaan pada Tabel 3 kemudian dihitung jumlah

realisasinya dengan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4 dan Grafik 1 memperlihatkan perbandingan realisasi belanja Dana Desa di bidang ekonomi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 di Provinsi Maluku Utara. Tahun 2019 porsi belanja Dana Desa paling besar digunakan untuk menunjang keterbukaan wilayah, antara lain untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan,

Grafik 1 Realisasi Belanja Dana Desa pada Dimensi Ekonomi



Sumber: Diolah Peneliti

jembatan, serta sarana dan prasarana transportasi desa. Hal ini mengindikasikan bahwa program prioritas desa pada tahun tersebut lebih banyak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara, tahun 2020 dan 2021 terjadi pergeseran prioritas dalam penggunaan Dana Desa yang sebelumnya fokus pada infrastruktur berubah ke bantuan sosial. *Refocusing* belanja Dana Desa ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Bantuan sosial sebagian besar disalurkan dalam bentuk BLT untuk warga miskin desa sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Belanja Dana Desa untuk menunjang keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah mengalami penurunan selama periode observasi. Penurunan tersebut karena ada realokasi fokus belanja untuk penanganan Covid-19. Sementara, belanja Dana Desa untuk bantuan sosial mengalami fluktuasi, semula naik drastis di tahun 2020 kemudian relatif menurun di tahun 2021. Sebaliknya, belanja untuk penyertaan modal mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian sedikit naik di tahun 2021. Namun demikian, belanja Dana Desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes pada masa sebelum pandemi sudah cukup besar, sehingga BUMDes mempunyai cukup modal untuk menjalankan usahanya.

Data dari Kemendesa PDTT menunjukkan bahwa jumlah BUMDes terus mengalami peningkatan bahkan di

masa pandemi, yang mengindikasikan bahwa keberadaan BUMDes masih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk menunjang aktivitas ekonomi lokal. Secara total, belanja Dana Desa pada dimensi ekonomi di Provinsi Maluku Utara mengalami fluktuasi selama periode observasi. Semula naik drastis di tahun 2020 kemudian menurun di tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi karena jumlah belanja untuk penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun sebelumnya.

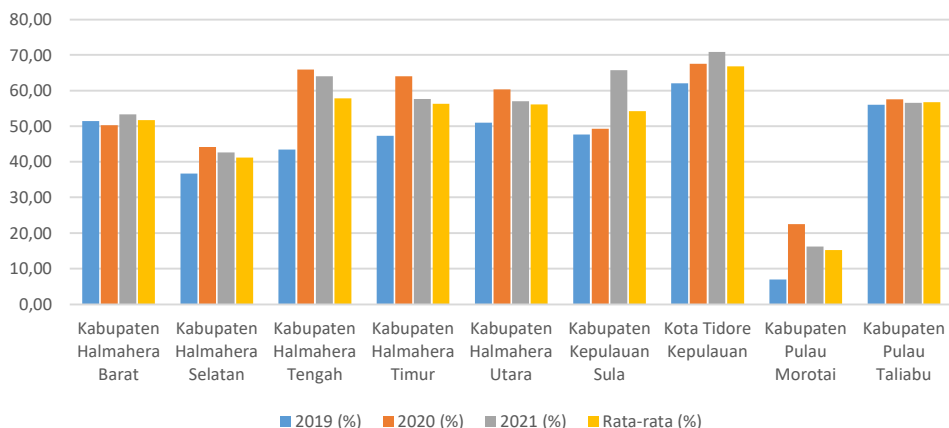
Realisasi belanja Dana Desa pada dimensi ekonomi tiap desa kemudian dibandingkan dengan total realisasi penyerapan pada masing-masing desa. Hasilnya adalah komposisi *share* belanja dimensi ekonomi terhadap realisasi penyerapan Dana Desa, atau dalam penelitian ini disebut dengan variabel SE. Besarnya *share* belanja ekonomi ini mencerminkan prioritas desa dalam memanfaatkan Dana Desa yang diterima.

Tabel 5 dan Grafik 2 menampilkan perbandingan *share* belanja ekonomi Dana Desa menurut kabupaten/kota di Maluku Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Terlihat bahwa *share* belanja ekonomi Dana Desa cenderung mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut bisa jadi lebih banyak digunakan untuk pemulihan ekonomi yang masih membutuhkan banyak dukungan dana melalui program BLT Desa atau mungkin digunakan juga untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Secara rata-rata, *share* belanja ekonomi Dana Desa paling besar berada di Kota Tidore Kepulauan yang melebihi 66 persen. Hal tersebut

Tabel 5 *Share* Belanja Ekonomi Dana Desa menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Rata-rata (%)
1	Kabupaten Halmahera Barat	51,47	50,25	53,31	51,68
2	Kabupaten Halmahera Selatan	36,66	44,17	42,66	41,16
3	Kabupaten Halmahera Tengah	43,46	65,87	63,98	57,77
4	Kabupaten Halmahera Timur	47,28	64,04	57,60	56,31
5	Kabupaten Halmahera Utara	50,99	60,37	57,01	56,12
6	Kabupaten Kepulauan Sula	47,70	49,24	65,73	54,22
7	Kota Tidore Kepulauan	62,00	67,55	70,89	66,81
8	Kabupaten Pulau Morotai	6,96	22,46	16,21	15,21
9	Kabupaten Pulau Taliabu	56,00	57,58	56,53	56,71

Sumber: Diolah Peneliti

Grafik 2 *Share* Belanja Ekonomi Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota

Sumber: Diolah Peneliti

mengindikasikan bahwa desa-desa di daerah tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dibandingkan dengan sebagian besar daerah lainnya. Sebaliknya, *share* belanja ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pengaruh Kebijakan Program Prioritas Desa terhadap Struktur Ekonomi

Tujuan kedua studi ini adalah untuk menguji dampak kebijakan program prioritas desa terhadap

struktur ekonomi lokal. Untuk memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Pemilihan model dilakukan melalui Uji LM dan Uji Hausman. Hasil Uji LM menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) untuk ketiga model estimasi sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari alfa 1 %. Artinya, menolak hipotesis untuk menggunakan *pooled least square* dan menerima hipotesis untuk menggunakan *random effect*. Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa *p-value* untuk ketiga model estimasi sebesar 0.0000

Tabel 6 *Robustness Check* Regresi Data Panel

Variabel	PP		PS		PT	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
DD	0.000309	0.000601	0.00213***	0.00111	-0.00244	-0.00244
BD	0.524	0.685	0.200	0.167	-0.724	-0.852
SE	-0.0171**	-0.0150*	0.0118***	0.00977***	0.00537	0.00526
JP		-0.0000120		0.00466***		-0.00465***
DT		0.603		-0.0165		-0.587
Konstanta	80.51***	79.86***	-1.502**	-5.037***	20.99***	25.18***
Observasi	3149	3149	3149	3149	3149	3149
Adj. R-sq	-0.508	-0.507	-0.490	-0.393	-0.509	-0.498

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Robust standard error

Sumber: Diolah Peneliti

atau lebih kecil dari alfa 1 %. Artinya, menolak hipotesis untuk menggunakan *random effect* dan menerima hipotesis untuk menggunakan *fixed effect*, sehingga model terbaik yang disarankan untuk mengestimasi komposisi tenaga kerja di desa adalah menggunakan model *fixed effect*.

Model *fixed effect* dapat mengurangi masalah *unobserved heterogeneity* yang mungkin berpotensi untuk menciptakan *endogenitas*. Model ini dapat mengatasi *endogenitas* yang disebabkan oleh *Omitted Variable Bias* (OVB) yang bersifat *time-invariant*, dalam hal ini karakteristik desa yang tidak berubah dapat berpengaruh terhadap komposisi tenaga kerja. Dalam penelitian ini, variabel kontrol luas wilayah merupakan variabel *time invariant*, sehingga variabel tersebut tidak dimasukkan dalam model. Setelah memilih model regresi data panel yang terbaik, kemudian dilakukan *robustness check* untuk melihat validitas struktur model regresi.

Hasil *robustness check* pada Tabel 6 menunjukkan nilai *Adjusted R-square* dari model 2 untuk masing-masing estimasi model PP, PS, dan PT lebih tinggi dibandingkan model 1. Selain itu, beberapa variabel kontrol yang dimasukkan menunjukkan nilai koefisien yang signifikan. Berdasarkan informasi tersebut, maka model yang akan dipilih untuk proses selanjutnya adalah model 2 yang memasukkan variabel kontrol.

Selanjutnya, dilakukan uji *multikolinearitas* berdasarkan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF), jika nilai

Tabel 7 Uji *Multikolinearitas* Regresi Data Panel

Variabel	VIF	1/VIF
DD	8.51	0.117457
SE	4.82	0.207308
BD	3.44	0.290641
JP	2.54	0.394337
DT	1.52	0.658374
Mean VIF	4.17	

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 8 Estimasi Komposisi Pekerja Per Sektor

Variabel	PP	PS	PT
DD	0.000601	0.00111	-0.00171
BD	0.685	0.167	-0.852
SE	-0.0150*	0.00977***	0.00526
JP	-0.0000120	0.00466**	-0.00465***
DT	0.603*	-0.0165	-0.587*
Konstanta	79.86***	-5.037**	25.18***
Observasi	3149	3149	3149
Adj. R-square	0.002	0.077	0.008

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Robust standard error

Sumber: Diolah Peneliti

VIF kurang dari 10 maka diindikasikan terbebas dari *multikolinearitas*.

Hasil Uji *Multikolinearitas* dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala *multikolinearitas* antar variabel bebas dalam model regresi.

Hasil estimasi komposisi pekerja di sektor primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan metode *cluster standar error* dapat dilihat pada Tabel 8. Kenaikan Dana Desa menaikkan persentase komposisi tenaga kerja sektor primer dan sekunder serta menurunkan persentase komposisi tenaga kerja sektor tersier. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa mendukung lapangan kerja di sektor primer dan sekunder.

Keberadaan BUMDes menaikkan persentase komposisi tenaga kerja sektor primer dan sekunder serta menurunkan persentase komposisi tenaga kerja sektor tersier. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes lebih banyak mendukung lapangan kerja di sektor primer dan sekunder. Dana Desa dan keberadaan BUMDes terbukti

merubah struktur komposisi tenaga kerja di desa dengan adanya pergeseran dari sektor tersier ke sektor primer dan sekunder. Selanjutnya, kenaikan komposisi *share* belanja ekonomi Dana Desa menurunkan persentase komposisi tenaga kerja sektor primer serta menaikkan persentase komposisi tenaga kerja sektor sekunder dan tersier. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja ekonomi mendukung lapangan kerja di sektor sekunder dan tersier.

Kenaikan jumlah penduduk menurunkan persentase komposisi tenaga kerja sektor primer dan tersier serta menaikkan persentase komposisi tenaga kerja sektor sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan penduduk akan meningkatkan komposisi tenaga kerja di sektor sekunder. Selanjutnya, status daerah tertinggal akan menaikkan persentase komposisi tenaga kerja sektor primer serta menurunkan persentase komposisi tenaga kerja sektor sekunder dan tersier. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja pada desa-desa yang berada di daerah tertinggal lebih banyak di sektor primer dibanding sekunder dan tersier.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil *mapping* dan *tagging* menunjukkan bahwa, pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan program Dana Desa yang terkait dengan dimensi ekonomi sebagian besar digunakan untuk mendukung keterbukaan wilayah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada masa sebelum pandemi Covid-19, secara umum program prioritas desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur. Sementara, pada tahun 2020-2021 penggunaan Dana Desa bergeser prioritasnya menjadi bantuan sosial guna mendukung program pemulihan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan riil di desa. Porsi realisasi Dana Desa terbesar untuk keterbukaan wilayah pada tahun 2019 dan untuk bantuan sosial pada tahun 2020 dan 2021 telah sesuai dengan pedoman pemerintah tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Selanjutnya, hasil *tagging* menunjukkan bahwa *share* belanja ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sebaliknya, *share* belanja ekonomi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan angka lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa desa-desa di daerah tersebut mempunyai prioritas yang lebih tinggi terhadap pembangunan ekonomi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Temuan empiris pada penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan Dana

Desa dan keberadaan BUMDes meningkatkan komposisi tenaga kerja sektor primer dan sekunder serta menurunkan komposisi tenaga kerja sektor tersier. Pergeseran struktur tenaga kerja tersebut mengindikasikan bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi di desa. Temuan tersebut telah sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu Dana Desa dan keberadaan BUMDes akan mempengaruhi struktur ekonomi desa. Hasil estimasi yang menunjukkan koefisien dari variabel DD dan SE bernilai kecil sementara variabel BD bernilai lebih besar mengindikasikan bahwa, perubahan postur anggaran Dana Desa akan memberikan efek yang kecil terhadap perubahan struktur ekonomi, sedangkan pembangunan BUMDes mempunyai peran yang lebih besar terhadap perubahan struktur ekonomi desa.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran kebijakan yang dapat dilakukan, antara lain: pertama, pemerintah pusat perlu menyusun pedoman pemanfaatan Dana Desa dalam menyambut perubahan struktur ekonomi desa, karena saat ini telah terjadi perubahan struktur ekonomi di desa yang ditandai dengan pergeseran struktur pekerja dari sektor tersier ke sektor primer dan sekunder di Maluku Utara; kedua, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait pentingnya peranan BUMDes dalam mendukung aktivitas ekonomi desa dan mendorong agar setiap desa memiliki BUMDes sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Temuan penelitian bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa sejalan dengan pembangunan ekonomi desa. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini antara lain *series* data relatif pendek, selain itu hasil *mapping* dan *tagging* pada penelitian ini mungkin akan berbeda jika dilakukan oleh peneliti lain, karena adanya perbedaan sudut pandang atau unsur subjektivitas saat melakukan pemetaan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: pertama, *series* data untuk meneliti perubahan struktur ekonomi sebaiknya lebih panjang, karena pada umumnya perubahan struktur ekonomi bersifat jangka panjang; kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan data keberadaan BUMDes, namun juga dapat melengkapi datanya meliputi jumlah dan jenis BUMDes di tiap-tiap desa untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis; ketiga, perlu menambahkan variabel kontrol lain yang dapat mencerminkan karakteristik desa, misalnya Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

REFERENSI

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(January), 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35490>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- De Mello, L. R. (2000). Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: A cross-country analysis. *World Development*, 28(2), 365–380. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00123-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00123-0)
- Dwitayanti, Y., Maria, Nurhasanah, & Armaini, R. (2020). *The impact of village fund program implementation toward society welfare in Indonesia*, 431(1). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200407.020>
- Hindriks, J., & Myles, G. D. (2006). *Intermediate Public Economics*. MIT Press.
- Indra, J., & Khoirunurrofik. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *PLoS ONE*, 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743>
- Kadafi, M., Sudarlan, & Sudrahman, H. (2020). The implications of village

- funds received by underdeveloped village per district/city against poverty in Indonesia and literacy rate: Emperical evidence in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 3924–3928.
- Kemenkeu. (2019). *Buku pintar dana desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat* (Cetakan ke-2). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/228357-desentralisasi-fiskal-dan-pertumbuhan-ek-61c4f8ef.pdf>
- Murliasari, R. (2021). Implementation of village fund management policy affirmation in village development. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 555–567. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.555-567>
- Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and income inequality in Indonesia: New evidence from village funds. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 38–42.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public finance* (Ninth Edit). McGraw-Hill. <https://doi.org/10.1002/ncr.4100780411>
- Saragi, N. B., Muluk, M. R. K., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Indonesia's village fund program: Does it contribute to poverty reduction? *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.21787/jpb.13.2021.65-80>
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: Studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Tiwari, S. (2017). Does local development influence outmigration decisions? Evidence from Indonesia. *World Development*, 93(August 2013), 108–124. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.028>
- Wooldridge, J. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*, 2ed by Wooldridge J.M. (z-lib.org).pdf (p. 1079). https://books.google.co.id/books?id=yov6AQAAQBAJ&redir_esc=y
- Yazid, Y., Abdullah, A., & Mustafa, M. (2019). *Desa funds and achievement of SDG'S Purpose: normative study of sustainable development in Indonesia*. In *Proceedings of the 10th International Symposium on Islam, Civilization and Science (Isicas 2019)*. October, 139–152.
- Yusuf, M., & Khoirunurrofik, K. (2022). The relationship of village funds with village economic development: a village level study

in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*,
14(3), 493–504.
<https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504>